

ABSTRAK

Dyah Indrawati, *Kartasura Bergolak: Studi tentang Konflik Internal Masa Kepemimpinan Pakubuwana II (1726-1749)*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan. Pertama, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya konflik internal di Kartasura pada masa Pakubuwana II (1726-1749). Kedua, mengetahui kebijakan Pakubuwana II dalam membendung meluasnya konflik internal di Kartasura. Ketiga, memahami dampak yang ditimbulkan dari gejolak konflik internal di Kartasura.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan *Babad Kartasura II* sebagai sumber primer. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode heuristik, kritik, analisis sumber hingga penulisan. Studi ini menggunakan pendekatan antropologi untuk memahami penyebab munculnya konflik internal di Kartasura. Konsep politik patrimonial dalam monarki menjadi landasan teoritis untuk memperoleh gambaran dinamika politik pada masa tersebut. Hal itu akan dipadukan dengan pemahaman tentang konsep ‘magis-religius’ sebagai salah satu konsep yang memiliki peran untuk memperkokoh kekuasaan raja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem politik patrimonial monarki tanpa aturan suksesi yang jelas akan selalu memunculkan konflik internal. Dalam prakteknya, konflik internal di Kartasura tidak hanya dipicu oleh problem suksesi melainkan ada beberapa gejala lain yang terjadi seperti: meregangnya hubungan *negara* dan *mancanagara*; problem distribusi kekuasaan: wewenang yang melampaui kekuasaan; hingga makar. Demi menggalang simpati dalam menghadapi kecenderungan-kecenderungan tersebut, yang dipandang mampu merongrong kekuasaannya, Susuhunan Pakubuwana II mengedepankan politik silsilah atau politik perkawinan, politik gelar hingga politik sayembara dalam beberapa kebijakannya. Ironisnya, problem keagungbinataraan diduga juga menjadi alasan dari kegagalan kepemimpinan Susuhunan Pakubuwana II (1726-1749) yang tercermin dari krisis kepercayaan diri susuhunan yang memuncak pada kebijakan 11 Desember 1749: penyerahan kedaulatan Mataram atas VOC. Sejak ini VOC memberlakukan politik *divide et impera* secara de facto atas Kartasura.

Kata kunci: *Pakubuwana II, Kartasura, konflik internal*

ABSTRACT

Dyah Indrawati, *Turmoil in Kartasura: Study of Internal Conflict of Pakubuwana II Period* (1726-1749). Thesis. Yogyakarta: Department of History, Faculty of Letters, Sanata Dharma University, 2015.

This study aims to address three issues. First, is to find out the factors of internal conflicts emergence in the Kartasura during Pakubuwana II (1726-1749). Second, is to know the policies of Pakubuwana II to hold the spread of internal conflicts in the Kartasura. Third, is to understand the impact of the turmoil of internal conflicts in the Kartasura.

This research is literature study and using *Babad Kartasura II* as a primary source. Analyses were performed using heuristic methods, criticism, thus analysis of sources to historiography. This study used anthropological approach to understand the causes of the internal conflicts in the Kartasura. The concept of patrimonial politics in the monarchy is used as basically theoretical to obtain a picture of the political dynamics in that moment. And it combined with an understanding of the concept of “magical-religious” as one of the concepts to strengthen the power of the king.

The results showed that the political system of patrimonial monarchy without a clear succession rules always brought up the internal conflict. In practice, the internal conflict in the Kartasura not only triggered by a problem of succession, but there were some other symptoms that occur such as: stretched relations between *negara* and *mancanagara*; the problem of the distribution of power: the authority that goes beyond power; to treason. To get sympathy in the face of these tendencies, which were deemed capable of undermining his authority, Susuhunan Pakubuwana II emphasizes political pedigree or political marriage, politics title, untuk political of competition in some of his policies. Ironically, the problem *keagungbinataraan* also suspected to be the reason of the failure of His Majesty Pakubuwana II (1726-1749) leadership which were reflected in the confidence crisis that culminated in the policy of Susuhunan on December 11, 1749: the transfer of sovereignty Mataram on VOC. Since this period, VOC carried the enforcement of *divide et impera* politics were de facto on Kartasura.

Key words: *Pakubuwana II, Kartasura, Internal conflict*